

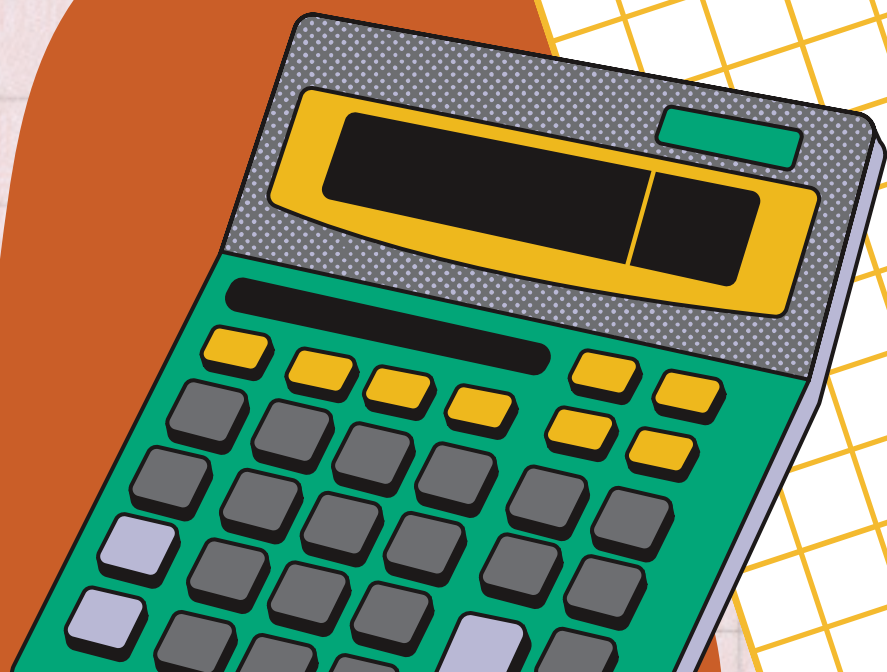


LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN 2025

KPKNL PEMATANGSIANTAR



KATA PENGANTAR



HARMONIS SIREGAR

Kepala Kantor KPKNL Pematangsiantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar adalah salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan

Informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pematangsiantar, Mei 2026

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Harmonis Siregar



DAFTAR ISI

Kata Pengantar		V. Catatan Atas Laporan Keuangan	7
Daftar Isi		INFORMASI PAGU DAN REALISASI ANGGARAN	20
Pernyataan Tanggung Jawab		INFORMASI ATAS NERACA	25
Ringkasan Laporan	1	INFORMASI ATAS LAPORAN OPERASIONAL	27
I. Laporan Realisasi Anggaran	1	INFORMASI LAPORAN EKUITAS	35
II. Neraca	1	INFORMASI PENTING LAIN	40
III. Laporan Operasional	1		
III. Laporan Perubahan Ekuitas	2		

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar Tahun 2024 (Unaudited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur- unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara tahun 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.821.067.359,00 atau mencapai 212.8% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp 2.734.431.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.842.273.990,00 atau mencapai 78.75% dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.339.282.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 31.931.940.994,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 38.435.549,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp 31.892.755.945,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp749.500,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.491.023,00 dan Rp31.930.449.971,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar , Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.769.457.891,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.278.595.220,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp3.490.862.671,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp3.490.862.671,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp32.305.161.319,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp 3.490.862.671,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp3.865.574.019,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp31.930.449.971,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 (Unaudited) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

Uraian	Catatan	Tahun 2025			31 Desember 2024
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.734.431.000,00	5.821.067.359,00	212.8	2.851.584.930,00
Jumlah Pendapatan		2.734.431.000,00	5.821.067.359,00	212.8	2.851.584.930,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0
Belanja Barang	B.4	2.260.482.000,00	1.806.637.210,00	79.92	1.707.717.116,00
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		2.260.482.000,00	1.806.637.210,00	79.92	
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	78.800.000,00	35.636.780,00	45.22	448.205.000,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		78.800.000,00	35.636.780,00	45.22	448.205.000,00
Jumlah Belanja		2.339.282.000,00	1.842.273.990,00	78.75	2.155.922.116,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	682.082,00	462.150,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	0,00	51.609.468,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	37.753.467,00	14.493.401,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		38.435.549,00	66.565.019,00
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.19	24.573.875.000,00	24.573.875.000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	4.545.546.759,00	4.949.642.125,00
Gedung dan Bangunan	C.21	8.236.157.313,00	8.236.157.313,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	0,00	0,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(5.462.823.127,00)	(5.509.765.695,00)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		31.892.755.945,00	32.249.908.743,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	846.707.846,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(845.958.346,00)	0,00
Jumlah Aset Lainnya		749.500,00	0,00
JUMLAH ASET		31.931.940.994,00	32.316.473.762,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	1.491.023,00	11.312.443,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	4.675.025,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.491.023,00	11.312.443,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		1.491.023,00	11.312.443,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.41	31.930.449.971,00	32.305.161.319,00
JUMLAH EKUITAS		31.930.449.971,00	32.305.161.319,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		31.931.940.994,00	32.316.473.762,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	5.769.457.891,00	2.773.559.112,00
Jumlah Pendapatan		5.769.457.891,00	2.773.559.112,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	82.214.777,00	82.214.777,00
Beban Barang & Jasa	D.4	830.741.245,00	850.653.852,00
Beban Pemeliharaan	D.5	606.709.606,00	425.966.698,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	294.413.110,00	337.506.032,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	494.258.635,00	527.112.705,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
Jumlah Beban		2.278.595.220,00	2.223.454.064,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		3.490.862.671,00	550.105.048,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	0,00	91.953.000,00
Surplus (Depisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		0,00	91.953.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		3.490.862.671,00	642.058.048,00
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		3.490.862.671,00	642.058.048,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	32.305.161.319,00	32.358.526.586,00
Surplus/Defisit LO	E.2	3.490.862.671,00	642.058.048,00
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		0,00	0,00
Lain-lain			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E.8	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain		0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.9	(3.865.574.019,00)	(695.423.315,00)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	(374.711.348,00)	(53.365.267,00)
Ekuitas Akhir		31.930.449.971,00	32.305.161.319,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar
Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrua

Pada Laporan Keuangan.

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar
Hukum
Entitas
dan
Rencana
Strategis

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematang Siantar merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

KPKNL Pematang Siantar berlokasi di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Pematang Siantar, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kerja KPKNL Pematang Siantar meliputi 2 Kota dan 5 Kabupaten, yang terdiri dari Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Tugas
dan
Fungsi

Sebagai unit vertikal di bawah DJKN, KPKNL Pematang Siantar selalu berupaya untuk mewujudkan visi DJKN dan menjalankan misi DJKN, dengan meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa/stakeholders dan berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempumaan

KPKNL Pematang Siantar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berharap dapat menjadi bagian DJKN dalam mengembangkan profil DJKN sebagai Pengelola (manajer) Kekayaan Negara yang disegani, sehingga tercipta tertib administrasi barang milik negara. Sedangkan dalam bidang pelayanan lelang, KPKNL Pematang Siantar berharap menjadi bagian DJKN dalam memperkenalkan lelang sebagai suatu cara penjualan yang paling diminati oleh masyarakat (Sales mean Auction), sehingga meningkatkan pemasukan negara. Dari sisi piutang

negara, KPKNL Pematang Siantar berharap dapat menyelesaikan tagihan-tagihan piutang negara yang diserahkan pengurusannya ke KPKNL Pematang Siantar.

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Sumatera Utara Tahun 2025

NILAI KINERJA ORGANISASI KPKNL PEMATANG SIANTAR Periode s.d Triwulan IV 2025											
Kode	IKU	Polarisasi	YIC	Target s.d Triwulan	Realisasi s.d Triwulan	Bobot IKU	Bobot Tertimbang IKU	Indeks Capaian IKU	Indeks Max. 120	Nilai Sasaran Strategi	Nilai Perspective
Stakeholder Perspective (30%)											
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-
1a-CP	Indeks Integritas	Max	P/M	100,00	105,29	14,00%	50,00%	105,29	120,00	60,00	120,00
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Max	P/M	100,00%	124,67%	14,00%	50,00%	124,67	120,00	60,00	-
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	-	-	-	-	-	-	-	-	112,09	-
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Max	P/L	100,00%	101,48%	19,00%	36,54%	101,48	101,48	37,08	-
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	Max	P/L	100,00%	116,87%	19,00%	36,54%	116,87	116,87	42,70	-
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Max	P/M	100,00%	418,77%	14,00%	26,92%	418,77	120,00	32,31	116,05
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	Max	P/M	77,00	95,94	14,00%	50,00%	124,60	120,00	60,00	-
3b-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Max	P/M	74,00	98,41	14,00%	50,00%	132,99	120,00	60,00	-
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-
4a-CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Max	P/M	100,00%	216,42%	14,00%	50,00%	216,42	120,00	60,00	-
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	Max	P/M	100,00%	120,00%	14,00%	50,00%	120,00	120,00	60,00	-
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	-	-	-	-	-	-	-	-	116,67	118,33
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Max	P/M	100%	110,00%	14,00%	33,33%	110,00	110,00	36,67	-
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	Max	P/M	70%	113,10%	14,00%	33,33%	161,56	120,00	40,00	-
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	Max	P/M	80%	110,33%	14,00%	33,33%	137,91	120,00	40,00	-
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	-	-	-	-	-	-	-	-	119,17	-
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	-
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Max	P/M	100,00	120,00	14,00%	33,33%	120,00	120,00	40,00	-
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Max	P/M	80,00%	94,00%	14,00%	33,33%	117,50	117,50	39,17	-
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	117,54	118,90
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	Max	P/M	100,00	115,07	14,00%	50,00%	115,07	115,07	57,54	-
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Max	P/M	80,00	114,25	14,00%	50,00%	142,81	120,00	60,00	-
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	-	-	-	-	-	-	-	-	120,00	-
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Max	P/M	80,00	98,90	14,00%	100,00%	123,62	120,00	120,00	-
NKO											118,52

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Pematangsiantar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja KPKNL Pematangsiantar adalah 1 entitas.

*Basis
Akun-
tansi*

A.4 Basis Akuntansi

KPKNL Pematangsiantar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Penguk-
uran*

A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Pematangsiantar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPKNL Pematangsiantar adalah sebagai berikut:

• Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

• Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;

Penda
patan -
LRA

Pendap
atan -
LO

- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782. Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang;
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.
- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara..;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

• **Belanja**

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

• **Beban**

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Aset**

Kebija
kan
Akunta
nsi
atas
Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

Aset
Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawah Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban se.cara jelas serta jumlahnya hisa diukur dengan andal,
 - c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah

cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil

perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

a. Aset Tetap

Aset
Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lainnya pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

Penyu
sutan
Aset
Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.

01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang
g
Jangka
Panjan
g

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset
Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode

garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika

diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2018 KPKNL Pematangsiantar telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara pengeluaran/penerimaan, piutang, aset tetap, persediaan dan General Ledger Pelaporan (GLP). Untuk KPKNL Pematangsiantar ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk ke dalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja
Rp2.268.410.000,00.

Satuan kerja KPKNL Pematangsiantar memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2.339.282.000,00..

Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp2.851.584.930,00

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.821.067.359,00 atau mencapai 212,8 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.734.431.000,00. Pendapatan Satuan Kerja KPKNL Pematangsiantar terdiri dari pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha; pendapatan bunga, pengelolaan rekening Perbankan dan pengelola keuangan, serta pendapatan denda lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian estimasi dan realisasi PNBPN sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	-	0,00
2	Pendapatan BLU lainnya	-	-	0,00
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan luran Badan Usaha	-	-	0,00
4	Pendapatan jasa Lainnya	-	500.000	0,00
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan RekeningPerbankan dan Pengelolaan Keuangan	2.734.431.000	5.820.051.209	212,84
6	Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	516.150	0,00
	Jumlah	2.734.431.000	5.821.067.359	212,88
	Pengembalian Pendapatan	-	(3.396.600)	0,00
	Jumlah Netto	2.734.431.000	5.817.670.759	212,76

Realisasi PNBPN Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.369.153.489,00 atau 137,41% dari realisasi 31 Desember 2024 yaitu Rp2.451.931.870,00. Perbandingan realisasi PNBPN Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Jasa Layanan Umum	-	-	0,00	0,00
2	Pendapatan BLU lainnya	-	-	0,00	0,00
3	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	-	83.770.000	-83.770.000,00	0,00
4	Pendapatan jasa Lainnya	500.000	1.500.000	-1.000.000,00	0,00
5	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	5.820.051.209	2.349.791.000	3.470.260.209,00	147,68
6	Pendapatan Lainnya	516.150	16.852.870	-16.336.720,00	0,00
	Jumlah	5.821.067.359,00	2.451.913.870,00	3.369.153.489,00	137,41

B.2. Belanja

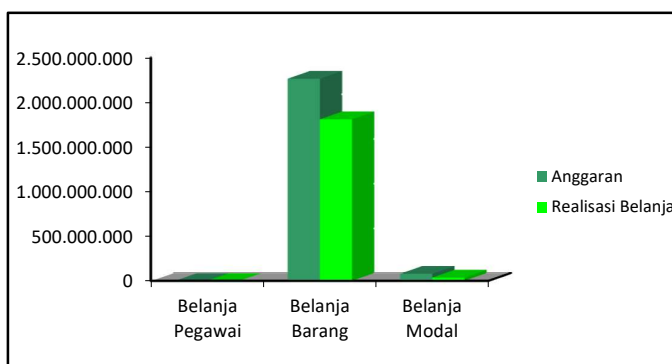
Realisasi Belanja
Negara
Rp1.842.273.990,00

Realisasi belanja KPKNL Pematangsiantar pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.842.273.990,00 atau sebesar 79.92 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp530.000,00. Anggaran belanja KPKNL Pematangsiantar Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.339.282.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	2.260.482.000,00	1.807.167.210,00	79.92
53	Belanja Modal	78.800.000,00	36.636.780,00	45.22
	Total Belanja Kotor	2.339.282.000,00	1.842.803.990,00	78.75
	Pengembalian	0	530.000,00	0.00
	Total Belanja Netto	2.339.282.000,00	1.842.273.990,00	78.75

Komposisi anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Perbandingan realisasi belanja Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	1.806.637.210,00	1.707.717.116,00	98.920.094,00
53	Belanja Modal	35.636.780,00	448.205.000,00	(412.568220,00)
	Jumlah	1.771.000430,00	1.259.512.116,00	464.883.062,00

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Pematangsiantar tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.806.637.210,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.806.637.210,00 dan Rp1.707.717.116,00. Realisasi belanja barang Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 5.7 persen dari realisasi belanja barang 31 Desember 2024.

Rincian Belanja Barang **Tahun 2025 dan 31 Desember 2024** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	792.145.541	651.124.810	141.020.731,00	21,66
Belanja Barang Non Operasional	31.835.000	50.000.000	-18.165.000,00	-36,33
Belanja Barang Persediaan	74.931.690	92.571.840	-17.640.150,00	-19,06
Belanja Jasa	6.602.263	150.547.236	-143.944.973,00	-95,61
Belanja Pemeliharaan	606.709.606	425.966.698	180.742.908,00	42,43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	294.413.110	337.506.032	-43.092.922,00	-12,77
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Kotor	1.806.637.210	1.707.716.616	98.920.594,00	5,79
Total Pengembalian Belanja Barang	530.000	-	530.000,00	0,00
Total Belanja Barang Netto	1.807.167.210,00	1.707.716.616,00	99.450.594,00	5,82

Belanja Modal
Rp35.636.780,00

Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp35.636.780,00 dan Rp448.205.000,00. Realisasi belanja modal Tahun 2025 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan 31 Desember 2024, hal ini disebabkan karena Tahun 2025 satker KPKNL Pematangsiantar tidak mendapat anggaran belanja sedikit dibandingkan tahun 2024.

Rincian Belanja Modal **Tahun 2025 dan 31 Desember 2024** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.636.780	448.205.000	-412.568.220,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	35.636.780	448.205.000	-412.568.220,00	0,00
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Netto	35.636.780,00	448.205.000,00	-412.568.220,00	0,00

B.6 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp35.636.780,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.636.780 dan Rp448.205.000,00 KPKNL Pematangsiantar

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024, penurunan tersebut disebabkan karena Tahun 2024 satker KPKNL Pematangsiantar mendapat pagu belanja modal tidak sebesar Tahun 2024.

Penurunan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun 2025 dibandingkan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada table berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Peralatan dan mesin	35.636.780	448.205.000	0,00
Penambahan nilai peralatan dan mesin	-	-	0,00
Peralatan dan Mesin - Penanganan pandemi	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	35.636.780	448.205.000	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	35.636.780	448.205.000	0,00

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 KPKNL Pematangsiantar.

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 KPKNL Pematangsiantar.

B.10 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal
Lainnya Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Aset Lancar

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp14.955.551,00 dan Rp1.295.208.559,00.

Rincian Aset Lancar pada KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	682.082,00	462.150,00	219.932,00
6	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0,00	0,00	0,00
7	Uang Muka Belanja (Prepayment)	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	51.609.468,00	51.609.468,00
9	Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	,00	0,00	0,00
11	Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)	0,00	0,00	0,00
12	Persediaan	37.753.467,00	14.493.401,00	10.596.562,00
13	Persediaan yang belum deregister	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	38.435.549,00	66.565.019,00	(28.129.470,00)

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk

bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungj	-	-
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP Tahun 2024 (Unaudited) masih dipergunakan sebagai uang persediaan untuk pelaksanaan operasional rutin perkantoran KPKNL Pematangsiantar.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak .

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Bank No acc ... (terlampir)	-	-
Uang Tunai	-	-
	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp682.082,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Pematangsiantar berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta pajak pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 682.082,00 dan Rp Rp462.150,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	682.082,00	462.150,00
	682.082,00	462.150

C.8 Pendapatan yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya.

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp51.609.468,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Bea Lelang PL II	-	51.609.468

Persediaan
Rp14.493.401,00

C.15. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp14.493.401,00 dan Rp3.896.839,00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	37.753.467,00	14.493.401,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	37.753.467,00	14.493.401,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Saldo aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp 31.892.755.945 dan Rp32.249.908.743,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada KPKNL Pematangsiantar berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Tanah	24.573.875.000,00	24.573.875.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.545.546.759,00	4.949.642.125,00
3	Gedung dan Bangunan	8.236.157.313,00	8.236.157.313,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		37.355.579.072,00	37.759.674.438,00
Akumulasi Penyusutan		(5.462.823.127,00)	(5.509.765.695,00)
Nilai Buku Aset Tetap		31.892.755.945,00	32.249.908.743,00

C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.573.875.000,00 dan Rp24.573.875.000,00.

Tanah
Rp24.573.875.000,00

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2024	24.573.875.000
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	0,
Mutasi Kurang :	
302 Transfer keluar	0,
Saldo per 31 Desember 2025	24.573.875.000

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa tanah.

Sampai dengan Tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal tanah dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Alamat lokasi Tanah	Luas (m2)	Nilai
1	Jalan Sisingamagraja No 79 Pematangsiantar	6.779	24.573.875.000,00
		6.779	24.573.875.000,00

Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh KPKNL Pematangsiantar.

C.20 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp4.545.546.759,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp4.545.546.759,00 dan Rp4.949.642.125,00. Sedangkan nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp825.587.066,00.

Rincian mutasi nilai aset peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2025	4.949.642.125
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	-
101 Pembelian	35.636.780
102 Transfer Masuk	406.975.700
103 Hibah masuk	-
105 Penyelesaian Pembangunan dengan kdp	-
106 Pembatalan Penghapusan	-
107 Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	-
115 Input perolehan BMN oleh Tim Pengemb	-
177 Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	-
Laporan Barang Ekstrakomtabel	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah di	-
Mutasi Kurang :	
264 Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
301 Penghapusan	-
302 Transfer keluar	-
304 Reklasifikasi keluar	-
305 Koreksi Pencatatan	-
401 Penghentian aset dari penggunaan	(846.707.846)
911 Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-
Belum teridentifikasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	4.545.546.759

Transfer masuk berupa sebuah kendaraan dinas roda empat, dan laptop sebesar Rp406.975.700,00. Transaksi transfer tambah juga berupa pembelian 10 (sepuluh) unit alat penyimpanan perlengkapan kantor berupa lemari penyimpanan sebesar Rp35.636.780,00.

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :

a. Transaksi penambahan dari Tansfer Masuk

1	MINIBUS	328.200.000,
3	Laptop	78.775.700,
	Jumlah	406.975.700

C.21 Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan Rp
8.236.157.313,00

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp8.236.157.313,00 dan Rp8.236.157.313,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp6.931.470.583,00 Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2025	8.236.157.313
Mutasi Tambah :	
208 Pengembangan melalui KDP	
Mutasi Kurang :	
264 Koreksi pencatatan Nilai berkurang	-
304 Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	8.236.157.313

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa gedung dan bangunan. Sampai dengan Tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal gedung dan bangunan dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.23 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp0,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset tetap tersebut berupa monografi. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Rincian mutasi aset tetap lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2025	-
Mutasi Tambah :	
102 Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	-

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa aset tetap lainnya. Sampai dengan Tahun 2025 tidak ada realisasi belanja modal lainnya dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.25 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(5.462.823.127,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(5.462.823.127,00) dan Rp(5.509.765.695,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	24.573.875.000,00	0	24.573.875.000,00
2	Peralatan & Mesin	4.545.546.759,00	(3.976.561.952,00)	568.984.807,00
3	Gedung & Bangunan	8.236.157.313,00	(1.486.261.175,00)	6.749.896.138,00
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang belum Diregister	0,00	0	0,00
	Jumlah	37.355.579.072,00	(5.462.823.127,00)	31.892.755.945,00

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp1.491.023,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Pematangsiantar per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.491.023,00 dan Rp11.312.443,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024 (Unaudited)	Tahun 2023 (Audited)
1	Utang kepada Pihak Ketiga	1.491.023,00	11.312.443,00
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
6	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.491.023,00	11.312.443,00

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp11.312.443,00

C.33. Utang kepada Pihak Ketiga

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.491.023,00 dan Rp11.312.443,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Pematangsiantar per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai yang belum dibayar	-
2	Belanja Barang yang belum dibayar	1.491.023
3	Belanja Modal yang belum dibayar	-
4	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-
5	Pegeluaran Transito yang masih harus dib	-
6	Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-
7	Dana Pihak ketiga	-
8	Dana Pihak ketiga Lainnya - BLU	-
	Jumlah	1.491.023,00

C.38. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.39. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.41. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp31.930.449.971,00 dan Rp32.305.161.319,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Uang Muka dari
KPPN Rp0,00

utang Jangka Pendek
Lainnya Rp0,00

Ekuitas
Rp31.930.449.971,00

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**Surplus (Defisit) Laporan Operasional**

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.490.862.671,00 dan surplus Rp642.058.048,00.

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp5.769.457.891,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.769.457.891,00 dan Rp2.773.559.112,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun %)
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	5.769.457.891	2.773.559.112	108
	5.769.457.891	2.773.559.112	108

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai KPKNL Pematangsiantar sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Pematangsiantar tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp82.214.777,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp52.472.624,00 dan Rp82.214.777,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	52.472.624	82.214.777	- 36,18
Jumlah	52.472.624	82.214.777	- 36,18

D.4 Beban Barang & Jasa

Beban Barang & Jasa
Rp830.741.245,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp830.741.245,00 dan Rp850.653.852,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian Jenis Beban	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban keperluan perkantoran	637.214.482	575.721.010	10,68
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	5.509.500	7.587.300	(27,39)
Beban honor operasional satuan kerja	96.300.000	67722000	42,20
Beban barang operasional lainnya	-	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	888.000	-	-
Beban bahan	16.645.000	35.970.000	(53,73)
Beban honor output kegiatan	-	-	-
Pengembalian Beban honor output kegiatan	- 530.000	-	-
Beban barang non operasional lainnya	15.190.000	14.030.500	8,26
Beban Langganan Listrik	-	135.935.667	-
Beban langganan telepon	1.150.913	10.281.685	(88,81)
Beban langganan air	3.563.350	3.005.690	18,55
Beban Penambah Daya Tahan T	2.810.000	-	-
Beban barang operasional lainnya	51.000.000	-	-
Beban jasa profesi	1.000.000	400.000	-
Beban jasa - Penanganan Pande	-	-	-

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp606.709.606,00

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp425.966.698,00 dan Rp425.966.698,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	606.709.606	425.966.698	42,43
Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	-	-	-
Beban pemeliharaan jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Beban pemeliharaan	-	-	-
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	-	-	-
Jumlah	606.709.606	425.966.698	42,43

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp294.413.110,00

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp294.413.110,00 dan Rp337.506.032,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	269.693.110	314.526.032	(14,25)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.720.000	22.980.000	7,57
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Beban Perjalanan	-	-	-
Jumlah	294.413.110	337.506.032	(12,77)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp494.258.635,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp494.258.635,00 dan Rp527.112.705,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	310.250.491	345.538.259	(10,21)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181.574.445	181.574.446	(0,00)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	2.433.699	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	494.258.635	527.112.705	(6,23)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Beban penyusutan aset kelolaan BUN	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	494.258.635	527.112.705	(6,23)

D.10 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	-	91.953.000	
Penjualan peralatan dan mesin	-	-	-
Tukar menukar peralatan dan mesin	-	-	-
Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	-	-	-
Pendapatan selisih kurs terealisasi - BLU	-	-	-
Penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TGR	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TP	-	-	-
Penerimaan kembali B.Peg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Brg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Mdl TAYL	-	-	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	-	-	-
Pendapatan Perolehan aset lainnya	-	-	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	91.953.000	-

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN	Tahun 2025	Tahun 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp32.305.161.319,00 dan Rp32.358.526.586,00, terdiri dari :

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Ekuitas awal	32.305.161.319	32.358.526.586	(0,16)
Surplus (Defisit) LO	3.490.862.671	642.058.048	443,70
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	-	-	-
Transaksi antar entitas	(3.865.574.019)	(695.423.315)	455,86
Kenaikan/Penurunan ekuitas	(374.711.348)	(53.365.267)	602,16
Ekuitas akhir	31.930.449.971	32.305.161.319	(1,16)

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp32.358.526.586,00

Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 dan 01 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp32.358.526.586,00 dan Rp32.358.526.586,00.

Defisit LO
Rp3.490.862.671,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar surplus Rp3.490.862.671,00 dan surplus Rp642.058.048,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan keladian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar entitas
Rp(3.865.574.019,00)

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(3.865.574.019,00) dan Rp(695.423.315,00)

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.842.273.990
Diterima dari Entitas Lain	-5.821.067.359
Transfer Keluar	10.199.793
Transfer Masuk	103.019.557
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0
Jumlah	-3.865.574.019

E.10 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan
Ekuitas
Rp(374.711.348,00)

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp374.711.348,00) dan (Rp53.365.267,00).

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/Defisit LO	3.490.862.671	642.058.048
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi lainnya	0	0
Transaksi antar entitas	-3.865.574.019	- 695.423.315
Jumlah	-374.711.348	-53.365.267

Ekuitas Akhir
Rp31.930.449.971,00

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp31.930.449.971,00 dan Rp32.305.161.319,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. REKENING PEMERINTAH**

Daftar informasi rekening pemerintah disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.2 . PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN➤ **Capaian Kinerja/Output**

Capaian kinerja/output 31 Desember 2025 sudah tercapai 100,00 persen bahkan ada yang melampaui target output yang telah ditetapkan sebelumnya, capaian kinerja/output tahun 2025 dapat dilihat pada table berikut :

Uraian Output	Belanja			Output		
	Pagu	Ralisasi	%	Target	Realisasi	%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	59280000	50518280	85,22	45	110	244,44
Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	12000000	11827000	98,56	4	4	100,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	16608000	15560315	93,69	153	188	122,88
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	32294000	7824000	24,23	50	50	100,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	10992000	3775000	34,34	28	28	100,00
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	1540000	0	0,00	30	30	100,00
Risalah Lelang	11006000	10901000	99,05	340	345	101,47
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	7500000	6318000	84,24	1	1	100,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	16800000	12448000	74,10	2	2	100,00
Penggalan Potensi Lelang	39873000	18820000	47,20	2	2	100,00
Aset BUN yang Dikelola	20676000	14880000	71,97	4	4	100,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	29562000	26452000	89,48	52	128	246,15
Pembinaan/Edukasi Publik	20000000	1000000	5,00	120	120	100,00
Kehumasan	4474000	1394000	31,16	12	12	100,00
Pameran/Eksibisi	12500000	3559000	28,47	1	1	100,00
Kerumahtanggaan	133912000	106127085	79,25	12	12	100,00
Layanan Bantuan Hukum	36671000	35844430	97,75	8	9	112,50
Layanan Perkantoran	1787350000	1479389100	82,77	12	12	100,00
Peralatan Fasilitas Perkantoran	78800000	35636780	45,22	10	10	100,00
Rekomendasi Kepatuhan Internal	7444000	0	0,00	6	8	133,33
Jumlah	2.339.282.000	1.842.273.990	78,75			

➤ Nilai IKPA, SMART DJA dan PKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sangat baik yaitu 100%, nilai capaian SMART DJA dan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) masing-masing mencapai 96,44% dan 100%.

Nilai capaian IKPA, SMART DJA dan PKPA dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator IKU	Nilai Akhir
A) Nilai IKPA (Bobot 50%)	100
1. Revisi DIPA	100%
2. Deviasi Hal III DIPA	100%
3. Penyerapan Anggaran	100%
4. Belanja Kontraktual	100%
5. Penyelesaian Tagihan	100%
6. Pengelolaan UP dan TUP	100%
7. Dispensasi SPM	0%
8. Capaian Output	100%
B) Nilai SMART (Bobot 50%)	96,44%
Nilai Capaian IKU IKA s.d TW IV	120%

LAMPIRAN

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANGSIANTAR

Tgl Data : 05/02/26 1:44 PM

Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,769,457,891	2,773,559,112	2,995,898,779	108.016
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	5,769,457,891	2,773,559,112	2,995,898,779	108.016
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	5,769,457,891	2,773,559,112	2,995,898,779	108.016
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	52,472,624	82,214,777	(29,742,153)	(36.176)
Beban Barang dan Jasa	830,741,245	850,653,852	(19,912,607)	(2.341)
Beban Pemeliharaan	606,709,606	425,966,698	180,742,908	42.431
Beban Perjalanan Dinas	294,413,110	337,506,032	(43,092,922)	(12.768)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANGSIANTAR

Tgl Data : 05/02/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	32,305,161,319	32,358,526,586	(53,365,267)	(0.16)
SURPLUS/DEFISIT-LO	3,490,862,671	642,058,048	2,848,804,623	443.7
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(3,865,574,019)	(695,423,315)	(3,170,150,704)	455.86
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(374,711,348)	(53,365,267)	(321,346,081)	602.16
EKUITAS AKHIR	31,930,449,971	32,305,161,319	(374,711,348)	(1.16)

Keterangan :

FINAL

Pematang Siantar, 5 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARMONIS SIREGAR

NIP 196911221996031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEMATANGSIANTAR 119703

Tgl Data : 05/02/26 1:44 PM
Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,734,431,000	5,821,067,359	3,086,636,359	212.88	2,433,561,000	2,851,584,930	418,023,930	117.18
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,734,431,000	5,821,067,359	3,086,636,359	212.88	2,433,561,000	2,851,584,930	418,023,930	117.18
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,734,431,000	5,821,067,359	3,086,636,359	212.88	2,433,561,000	2,851,584,930	418,023,930	117.18
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,339,282,000	1,842,273,990	(497,008,010)	78.75	2,268,410,000	2,155,922,116	(112,487,884)	95.04
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,260,482,000	1,806,637,210	(453,844,790)	79.92	1,819,700,000	1,707,717,116	(111,982,884)	93.85
3. Belanja Modal	78,800,000	35,636,780	(43,163,220)	45.22	448,710,000	448,205,000	(505,000)	99.89
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

**SATUAN KERJA : (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANGSIANTAR**

Tgl Data : 05/02/26 1:44 PM

Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	682,082	462,150	219,932	47.59
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0	51,609,468	(51,609,468)	(100.00)
Persediaan	37,753,467	14,493,401	23,260,066	160.49
JUMLAH ASET LANCAR	38,435,549	66,565,019	(28,129,470)	(42.26)
ASET TETAP				
Tanah	24,573,875,000	24,573,875,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,545,546,759	4,949,642,125	(404,095,366)	(8.16)
Gedung dan Bangunan	8,236,157,313	8,236,157,313	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,462,823,127)	(5,509,765,695)	46,942,568	(0.85)
JUMLAH ASET TETAP	31,892,755,945	32,249,908,743	(357,152,798)	(1.11)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	846,707,846	0	846,707,846	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(845,958,346)	0	(845,958,346)	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	749,500	0	749,500	
JUMLAH ASET	31,931,940,994	32,316,473,762	(384,532,768)	(1.19)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,491,023	11,312,443	(9,821,420)	(86.82)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,491,023	11,312,443	(9,821,420)	(86.82)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,491,023	11,312,443	(9,821,420)	(86.82)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	31,930,449,971	32,305,161,319	(374,711,348)	(1.16)
JUMLAH EKUITAS	31,930,449,971	32,305,161,319	(374,711,348)	(1.16)
JUMLAH EKUITAS	31,930,449,971	32,305,161,319	(374,711,348)	(1.16)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31,931,940,994	32,316,473,762	(384,532,768)	(1.19)

Keterangan :

FINAL

Pematang Siantar, 5 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

HARMONIS SIREGAR

NIP 196911221996031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANGSIANTAR

Tgl Data : 05/02/26 1:44 PM

Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	682,082	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	37,753,467	0
0.0	131111	Tanah	24,573,875,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,545,546,759	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	8,236,157,313	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,976,561,952
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,486,261,175
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	846,707,846	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	845,958,346
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	808,941
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	682,082
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,842,273,990
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	5,821,067,359	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	10,199,793
0.0	313221	Transfer Masuk	0	103,019,557
0.0	391111	Ekuitas	0	32,305,161,319
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	4,678,690,183
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,089,107,670
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	643,888
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	516,150
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	637,214,482	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2,810,000	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,509,500	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	95,770,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	51,000,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	16,645,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	15,190,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,150,913	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,563,350	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	888,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,000,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395,845,450	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,864,156	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	269,693,110	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,720,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	310,250,491	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	181,574,445	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (119703) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG PEMATANGSIANTAR

Tgl Data : 05/02/26 12:39 PM

Tgl Cetak : 05/02/26 5:08 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,842,273,990
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	5,821,067,359	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	4,678,690,183
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	1,140,717,138
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	643,888
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	516,150
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	637,151,541	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2,810,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,414,000	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	96,300,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	51,000,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	16,645,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,190,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	74,931,690	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,150,913	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	3,563,350	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	888,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,000,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	395,845,450	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210,864,156	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	269,693,110	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24,720,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35,636,780	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	530,000
JUMLAH			7,663,871,349	7,663,871,349

Keterangan :

FINAL

Pematang Siantar, 5 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasas Pengguna Anggaran

HARMONIS SIREGAR

196911221996031001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
Negara/Lembaga :
Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
Wilayah : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
Satuan Kerja : KPKNL PEMATANGSIANTAR
No Dokumen : 5
Tanggal : 31 DESEMBER 2025
Tahun Anggaran : 2025
Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025 (Fax)

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penyusutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Langganan Pos	692.500	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		692.500

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Tri Feriandi
NIP 196902071994031002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Harmonis Siregar
NIP 196911221996031001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Afrina Butar Butar
NIP 19890424201502200



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Satuan Kerja : KPKNL PEMATANGSIANTAR
 No Dokumen : 5
 Tanggal : 31 DESEMBER 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025 (Fax)

Kategori Jurnal Penyesuaian

☐	Pendapatan Diterima di Muka	☐	Koreksi Antar Beban
☐	Pendapatan Yang Masih Harus diterima	☐	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
☐	Belanja Dibayar di Muka	☐	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
☒	Belanja yang Masih Harus Dibayar	☐	Pembentukan Piutang Jangka Panjang
☐	Penyisihan Piutang	☐	Pembentukan Piutang Jangka Pendek
☐	Penghapusan Piutang	☐	Transfer Masuk
☐	Penysutan Aset	☐	Transfer Keluar
☐	Kas di Bendahara Penerimaan	☐	Reklasifikasi Neraca
☐	Kas di Bendahara Pengeluaran	☐	Koreksi
☐	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521111	Belanja Langganan Fax	62.941	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		62.941

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Tri Feriandi
NIP 196902071994031002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Harmonis Siregar
NIP 196911221996031001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Afrina Butar Butar
NIP 19890424201502200



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Satuan Kerja : KPKNL PEMATANGSIANTAR
 No Dokumen : 5
 Tanggal : 31 DESEMBER 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Belanja Yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2025 (Air)

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
v	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	522113	Belanja Langganan Air	53.500	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		53.500

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Tri Feriandi
NIP 196902071994031002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Harmonis Siregar
NIP 196911221996031001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Afrina Butar Butar
NIP 19890424201502200



KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (119703) KPKNL PEMATANGSIANTAR
Kode dan Nama UAPPAW : (07) Sumatera Utara
Kode dan Nama Eselon 1 : (09) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kode dan Nama K/L : (015) Kementerian Keuangan

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	✓		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak

10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya

	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"			Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)			Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)			Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya

4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrua?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2022 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang		√	Tidak
3	Terdapat kodifikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	√		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Pyenyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak

4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
 Ditandatangani secara Elektronik Afrina Butar Butar  Pematangsiantar, Februari 2025 Ditandatangani secara elektronik Harmonis Siregar				

